

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan proses perekrutan pejabat politik di daerah yang berkedudukan sebagai pemimpin daerah melalui pemilihan secara demokratis. Pilkada secara langsung untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2005 dan berlanjut sampai sekarang. Pilkada dari tahun 2005 hingga 2014 merupakan hasil dari undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Peraturan tersebut menjelaskancalon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar pilkada serentak 9 Desember 2015 yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dengan pasal 201 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai

dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.”

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahun (1999-2002). Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis, peranan anggota DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih lewat pemilu, Pengawasan terhadap Presiden diperketat, dan Hak Asasi Manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat, amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung dan pertama kali dilaksanakan tahun 2004(Budiardjo, 2008).

Berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada langsung, tingkat partisipasi perempuan dalam ruang ini bisa dikatakan juga masih minim. Semula pilkada langsung diharapkan menjadi suatu mekanisme politik yang merepresentasikan kemampuan perempuan dalam jabatan politik di tingkatan lokal. Dengan pilkada langsung, perempuan dapat secara terbuka berkompetisi memperebutkan kursi kepala daerah. Namun kenyataannya, terlihat betapa keterwakilan perempuan dalam proses tersebut demikian rendah. Alih-alih perempuan memenangkan pilkada tersebut, jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai kandidat pun

sangat sedikit. Hasil pilkada langsung justru memperlihatkan bahwa jumlah kepala daerah perempuan tidak lebih baik dibandingkan saat pemilihan tidak langsung (melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD).

Pemilihan umum (pemilu) ataupun pemilihan kepala daerah (PILKADA) membuka peluang kehadiran perempuan dalam mewarnai kontestasi politik di Indonesia. Kontestasi politik Nasional tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehadiran perempuan dalam keikutsertaannya telah meramaikan dan mewarnai dinamika politik di Indonesia. pada saat PILKADA berlangsung daerah-daerah di Indonesia dapat dilihat beberapa nama dan gambar tokoh perempuan muncul terpampang di ruang-ruang publik.

Kecenderungan tersebut akan terus menguat sebagai hasil dari terus menguatnya gerakan dan tuntutan serta meluasnya kesadaran tentang kesetaraan gender atau pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperang aktif dalam segala bidang pembangunan tanpa mempermasalahkan sifat-sifat biologis yang dijelaskan sebagai suatu konsep kesetaraan gender (Holzsmer, 2014) oleh karena itu secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan gender adalah pemilihan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan sifat-sifat kodrati yang melekat padanya melainkan dalam perspektif fungsi dan peranan mereka dalam kehidupan yang sangat luas.

Langkah Demokratis berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (Pilkada) yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah diseluruh Indonesia dipilih melalui PILKADA

mulai pertengahan tahun 2005. Semenjak itu semua kepala daerah yang habis masa jabatannya harus dipilih melalui proses PILKADA yang bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah, hal ini tentu berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karna dipilih melalui DPR (Budiardjo, 2008).

PILKADA yang telah diadakan di Kabupaten Bima NTB adalah pemilihan calon bupati dan wakil bupati yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertujuan dapat membawa masyarakat Kabupaten Bima NTB kearah yang lebih demokratis. Arena kontestasi PILKADA di Kabupaten Bima NTB telah melahirkan pasangan bupati dan Wakil Bupati terpilih yang baru yaitu Indah Dharmayanti Putri dan Dahlan M. Noer.

Kontestasi politik Nasional telah menghadirkan perempuan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kaum perempuan telah ikut serta dalam meramaikan dan mewarnai dinamika politik di Indonesia seperti PILKADA. Keterlibatan perempuan dalam politik menawarkan sebuah pendekatan baru yang dapat merubah paradigma politik bahwa perempuan memiliki daya pikat tersendiri dalam dunia politik. Tawakkal Baharuddin dalam penelitiannya studi pada Indah Putri Indriani sebagai bupati terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015. Indah Putri Indriani sebagai seorang perempuan dan juga pendatang baru yang mampu mengakumulasi modalitas yang dimilikinya yaitu modal sosial, budaya, politik dan ekonomi, sehingga berhasil memenangkan sebuah kontestasi politik dan sekaligus berhasil menjadi bupati perempuan

pertama di Sulawesi Selatan. Ketertarikan dalam pembahasan ini adalah sosok Indah Darmayanti Putri yang merupakan Bupati perempuan pertama di Bima NTB. Adapun hasil perolehan suara pada PILKADA Bima NTB 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Hasil Perolehan Suara Pada PILKADA di Kabupaten Bima NTB Tahun 2015

No	pasangan calon Bupati dan wakil Bupati	Partai pendukung	perolehan suara	Keterangan
1	Abdul Khayir dan Abdul Hamid	-----	26.800 Suara (10.19%)	Selisih suara 31.291 (11.90%)
2	Ady Mahyudi dan A. Zubair	- PAN - PKB - PBB	56.429 Suara (21.49%)	
3	Syafrudin HM Nur dan Masykur HMS	- NASDEM - PDIP - DEMOKRAT - PPP	74.215 Suara (28.22%)	
4	Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan M. Noer	- GOLKAR - GERINDRA - HANURA	105.506 Suara (40.12%)	

Sumber: KPUD Bima

Dari rekapitulasi perolehan suara PILKADA di Kabupaten Bima NTB Tahun 2015 diperoleh suara Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan M. Noer unggul dari kandidat lain dengan hasil perolehan sebesar 40,11 %. Menarik untuk dicermati figuritas seorang Indah Dhamayanti Putri dalam memperoleh suara maksimal PILKADA di Kabupaten Bima NTB dengan latar belakang simbolik yang dimiliki yaitu istri dari Raja Bima yang ke XVI Ferry Zulkarnain.

Keterlibatan Indah Darmayanti menjelaskan tentang fenomena keluarga politik Raja Bima.

Keikutsertaan suami, istri, anak dan kerabat lainnya dari petahana dalam kancah politik, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, atau penempatan jabatan-jabatan penting lainnya menjelaskan fenomena keluarga politik (Purwaningsih, 2015). Keterlibatan keluarga dalam lingkup politik membantu dalam PILKADA. Adapun keluarga yang terlibat dalam politik Bima dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Keluarga politik Indah Darmayanti Putri di Kabupaten Bima NTB

Nama	Hubungan keluargaan	Jabatan	Periode
Ferry Zulkarnain (Alm)	Suami	Bupati Bima	2005-2010;2010-2015
		Wakil ketua DPD partai Golkar Kabupaten Bima	1998-2003
		Ketua umum dewan pimpinan daerah partai Golkar Kabupaten Bima	2003-2008;2008-2013
		Anggota DPRD Kabupaten Bima	1999-2003
		Wakil rakyat di DPRD Kota Bima	2003-2005
Ferdiansyah Fajar Islam	Adik Ipar	Ketua DPRD Kabupaten Bima	2009-2014
Ferra Amaliah	Adik Ipar	Ketua DPRD Kota Bima	2009-2014
		Calon walikota Bima	2010-2015; 2018-2023

Sumber : diolah dari sosial media dan KPUD Bima

Ketertarikan dalam pembahasan ini adalah sosok Indah Darmayanti Putri yang merupakan Bupati perempuan pertama di Bima NTB. Selain itu juga, Indah

Darmayanti Putri adalah istri dari Bupati Bima NTB dua periode sebelumnya (2005-2010 dan 2010-2015) yaitu Ferry Zulkarnain (Alm). Popularitas Indah Darmayanti dilihat dari sikap sosial dalam lingkungan masyarakat Bima selama Ferry Zulkarnain menjabat inilah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk Bupati Bima periode 2015-2020. Indah Dhamayanti Putri mempunyai banyak pengalaman politik yaitu pernah menjabat menjadi anggota DPRD, wakil ketua DPRD Kabupaten Bima perwakilan partai Golkar dan ketua DPC II partai Golkar. Indah Darmayanti Putri yang merupakan istri dari Raja Bima yang ke XVI dapat dijadikan sebagai modal simbolik ditambah lagi pandangan mitos, karisma dari masyarakat Bima terhadap kekuatan Raja Bima. Dukungan politik dari berbagai partai antara lain partai Golkar, Gerindra dan Hanura serta dukungan politik dari keluarga dapat dijadikan sebagai modal politik Indah Darmayanti. Keterlibatan perempuan dalam politik menawarkan sebuah pendekatan baru yang dapat merubah paradigma politik bahwa perempuan memiliki daya pikat tersendiri dalam dunia politik. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis modalitas yang dimiliki keluarga politik Indah Darmayanti Putri serta sebagai perempuan pertama yang memenangkan kontestasi PILKADA Kabupaten Bima NTB. Maka dari itu Analisis kemenangan akan difokuskan pada aspek modalitas yang dimiliki oleh kandidat Indah Darmayanti Putri yaitu: modal politik, modal sosial, modal ekonomi, dan modal simbolik.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah tertuang dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

modalitas keluarga politik Indah Darmayanti Putri dalam PILKADA Bupati Bima periode 2015-2020?

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana modalitas keluarga politik atas kemenangan kandidat Indah Darmayanti Putri dalam pemilu umum Bupati Bima periode 2015-2020.

I.3.2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana dan pemikiran bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai strategi politik dalam memenangkan pemilihan kepala daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi seluruh elemen masyarakat dan politik, bahwa setiap pasangan calon kandidat memiliki strategi dalam memenangkan pemilihan kepala daerah.